

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan, teori-teori tersebut sebagai berikut :

2.1.1 Ekonomi Demografi

Teori Malthus memberikan penjelasan bagaimana pentingnya keseimbangan penduduk dengan persediaan bahan makanan atau sumber daya. Malthus memiliki pandangan bahwa keberadaan sumber daya makanan sangat penting dalam memenuhi kelangsungan hidup, nafsu manusia tidak dapat terkontrol dan arus pertumbuhan penduduk jauh lebih pesat daripada arus pertumbuhan sumber daya makanan. Malthus juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk sesuai dengan pola deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan sumber daya makanan sesuai dengan pola deret hitung. Deret ukur dalam pandangan teori Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasarkan kelipatan yakni: 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sedangkan deret hitung menjelaskan peningkatan terjadi berdasarkan penambahan tetap, yakni 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Akibatnya di masa yang akan datang terjadi perbedaan yang cukup besar antara penduduk dengan ketersediaan sumber daya makanan. Teori yang dikemukakan oleh Malthus tersebut merupakan sebuah prediksi pesimistik terkait dengan kelangkaan pangan di masa yang akan datang.

Teori Malthus juga membahas tentang daya dukung dan tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen penting pada lingkungan, tanah tidak mampu menyediakan hasil pertanian secara optimal untuk mencukupi kelangsungan hidup penduduk dikarenakan kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga daya dukung tanah akan menurun. Oleh karena itu, jumlah penduduk harus sebanding dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban bagi lingkungan sehingga tidak mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu contoh dari dampak ketidakseimbangan tersebut seperti terjadinya banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, kemiskinan, kriminalitas, dan kematian, agar dapat mengatasi permasalahan kekurangan pangan maka pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Malthus memiliki pandangan ada beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan penduduk antara lain sebagai berikut :

1. *Preventive Checks*

Dalam *preventive checks* pengurangan penduduk dilakukan dengan cara menurunkan kelahiran seperti upaya-upaya untuk mengendalikan nafsu seksual, penundaan masa kawin (*moral restraint*) dan pengurangan penduduk dilakukan dengan cara pengurangan kelahiran (*vice*) seperti, aborsi, homoseksualitas, *promiscuity* dan *adultery*.

2. *Positive Checks*

Dalam *Positive Checks* pengurangan penduduk terjadi karena segala keadaan yang dapat mengakibatkan kematian seperti kejahatan kriminalitas, dan pembunuhan (*vice*) dan pengurangan penduduk melalui berbagai proses

penyebab kematiannya seperti epidemik, bencana alam, kelaparan dan peperangan (*miser*).

2.1.2 Ekonomi Sumber Daya Manusia

Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang pasar tenaga kerja (market of labor), yaitu mempelajari bagaimana perilaku perusahaan (sisi permintaan) dan pekerja (sisi penawaran) terhadap aspek-aspek ketenagakerjaan seperti tingkat upah, harga, keuntungan perusahaan, serta aspek-aspek lainnya seperti kondisi kerja.

Sumber daya manusia (SDM) mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Sumber daya manusia sebagai usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam pengertian ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian ini menyangkut sumber daya manusia dari segi kualitas.
2. Sumber daya manusia menyangkut jumlah manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Orang yang mampu bekerja termasuk ke dalam kelompok penduduk dalam usia kerja yang dinamakan tenaga kerja (*manpower*). Pengertian ini menyangkut sumber daya manusia dari segi kuantitas.

2.1.3 Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berartikan kejahatan atau juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Kriminalitas berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu "*crime*" yang diartikan sebagai kejahatan dan

“*criminal*” yang diartikan sebagai orang yang melakukan kejahatan. Istilah kriminalitas memiliki definisi yang sangat beragam. Dilihat dari kaca mata hukum, kriminalitas merupakan tindakan atau kelalaian yang tidak dibolehkan oleh hukum sehingga siapapun yang melakukan tindakan kriminalitas akan mendapatkan sanksi tindakan pidana seperti penjara ataupun denda ganti rugi.

2.1.3.1 Teori Kriminalitas

Gary Becker merupakan tokoh yang mendukung penerapan model perilaku rasional secara luas. Dalam konteks kejahatan pendekatan rasionalitas digunakan untuk mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan untung rugi yang didapat oleh seseorang dari pengambilan keputusan untuk ikut serta dalam tindakan kriminal.

Becker (1968) mengemukakan suatu model fungsi kerugian sosial atau *social-loss function*, fungsi ini menjelaskan kerugian masyarakat sebagai akibat adanya perbuatan illegal atau kejahatan. Fungsi kerugian sosial yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

$$L = D (O) + C (P, O) + bpfO$$

Keterangan :

L	= Total kerugian
D (O)	= Biaya Kerugian
C (P, O)	= Biaya Keyakinan
bpfO	= Kerugian Sosial Hukum
O	= Jumlah Pelanggaran
P	= Rasio Pelanggaran
PO	= Jumlah Pelanggaran yang dihukum
bf	= Kerugian sosial per pelanggaran

- f = Hukum per pidana
- b = Nilai Koefisien yang tergantung jenis pelanggaran (b = 0 : Denda. b > 1 : Masa Percobaan, Pembebasan Bersyarat dan Penjara)

Berdasarkan fungsi diatas, Becker menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang terjadi pada kehidupan masyarakat mengakibatkan kerugian sosial pada masyarakat atau *social loss*. Menurut becker keikutsertaan suatu individu dalam melakukan kejahatan bukan hanya karena motivasi dasar tetapi didasarkan pada pemikiran rasional seperti perhitungan manfaat-biaya (*Benefit Cost Analysis*) yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan (*Probability*) tertangkap dan hukuman yang diterima. Seorang individu akan ikut dalam tindakan illegal atau kriminal apabila ekspektasi utilitas (*Expacted utility*) yang didapat dengan menggunakan waktu dan sumber daya lainnya untuk tindakan illegal lebih besar dari pada ekspektasi utilitas yang digunakan untuk tindakan legal.

2.1.3.2 Jenis dan Klasifikasi Kriminalitas

Berikut ini jenis dan klasifikasi kejahatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia :

Tabel 2.1 Klasifikasi dan Jenis Kejahatan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat
		Penganiayaan Ringan
		Kekerasan dalam Rumah Tangga

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan
		Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan
		Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan
		Pencurian dengan Kekerasan menggunakan Senjata Api
		Pencurian dengan Kekerasan menggunakan Senjata Tajam
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian
		Pencurian dengan pemberatan
		Pencurian Kendaraan Bermotor
		Pengrusakan/Penghancuran Barang
		Pembakaran dengan Sengaja
		Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang
		Penggelapan
		Korupsi
9	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

2.1.3.3 Pelaku dan Korban Kriminalitas

Menurut konsep kriminalitas dalam Polri (2022) yang dimaksud pelaku kejahatan yaitu :

1. Orang yang melakukan kejahatan
2. Orang yang turut melakukan kejahatan
3. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
4. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
5. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

Sedangkan korban kriminalitas merupakan seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.1.3.4 Indikator Kriminalitas

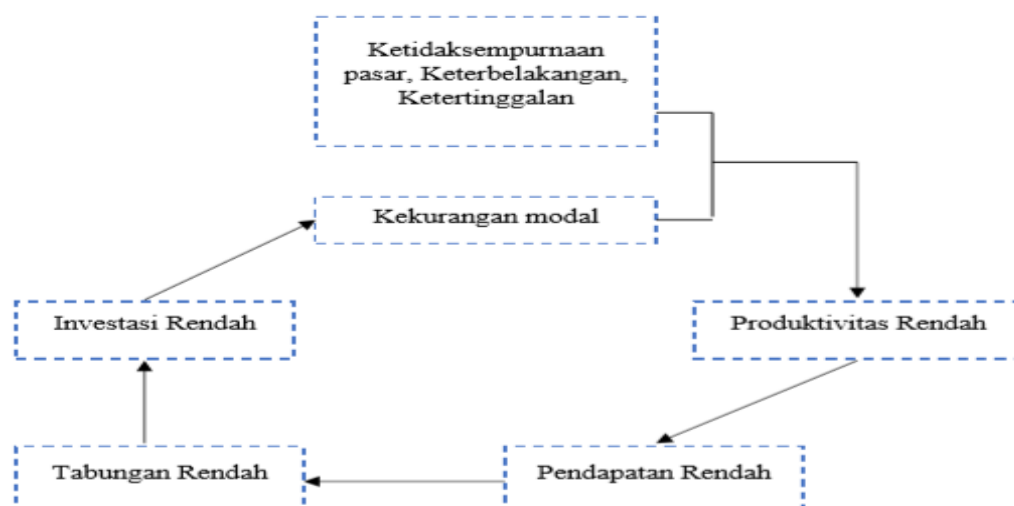
Secara umum ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan kejahatan secara menyeluruh, indikator tersebut yaitu total kejahatan (*Crime Total*), tingkat kejahatan (*Crime Rate*) dan selang waktu kejahatan (*Crime Clock*). Total kejahatan merupakan kejadian tindak kejahatan yang terjadi dalam waktu tertentu pada suatu wilayah.

2.1.4 Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistika (2023) kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan *non* makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Definisi kemiskinan pada umumnya selalu berhubungan hanya dengan aspek ekonomi saja tetapi dilihat lebih luas kemiskinan bisa ditinjau dari aspek sosial dan budaya. Selain itu kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan kebutuhan pada aspek sosial seperti terabaikan dari lingkungan sosial dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Kemiskinan akan menciptakan masalah sosial baru seperti yang dikemukakan oleh Pare dan Felson (2014) bahwa individu yang berada dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko untuk melakukan tindak kriminalitas.

2.1.4.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan merupakan suatu konsep mengenai kondisi-kondisi yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan yang akhirnya mengakibatkan suatu negara tetap pada kondisi miskin dan akan menjadi hambatan dalam mencapai kondisi pembangunan yang baik. Menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) menjelaskan apabila terdapat keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal. Kondisi ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan tingkat pendapatan dihasilkan menjadi rendah, tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam menabung sehingga pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi, kondisi tabungan dan investasi yang rendah akan mengakibatkan keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal, kondisi tersebut akan terus terjadi dan berulang.



Sumber : Nurkse (1953)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

2.1.4.2 Jenis Kemiskinan

Para ahli mengelompokkan kemiskinan menjadi tiga jenis kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi karena kurangnya sumber daya alam dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya alam yang tidak memadai dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia akan membuat kemampuan produksi ikut turun.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural terbentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang sudah tertanam dan menjadi budaya yang akan mempengaruhi pola pikir, kelakuan dan cara mereka bekerja. Terkadang meskipun ada dorongan dari pihak lain untuk memperbaiki taraf hidupnya individu atau masyarakat miskin tersebut sulit melakukan perubahan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural tercipta secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena struktur sosial ataupun tatanan kelembagaan yang ada tidak mampu menghubungkan masyarakat untuk mengakses semua sumber daya yang tersedia secara optimal. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial yang dimaksud memiliki arti sebagai suatu tatanan organisasi ataupun aturan-aturan yang berlaku.

2.1.4.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistika (2023) garis kemiskinan memberikan gambaran nilai rupiah minimum yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup selama periode tertentu. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan, metode perhitungannya disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan garis kemiskinan *non* makanan yang mengacu pada kebutuhan selain makanan seperti kebutuhan tempat tinggal, pendidikan dan lain-lain. Banyaknya penduduk miskin dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Keterangan :

- P_0 = Persentase Penduduk Miskin
- z = Garis Kemiskinan
- y_i = Rata – rata pengeluaran perkapita sebulan di bawah garis kemiskinan
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

2.1.5 Kepadatan Penduduk

Menurut Mantra (2000) yang dimaksud dengan kepadatan penduduk ialah perbandingan antara banyaknya penduduk yang berada pada suatu daerah dengan luas wilayah yang ditematinya. Hardianto (2009) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang cepat akan mempengaruhi pada tingkat kepadatan di daerah tersebut ini dikarenakan akibat penduduk yang terus bertambah sedangkan lahan untuk ditempati terbatas dan bersifat tetap.

Kepadatan penduduk akan memberikan beberapa dampak seperti timbulnya kemiskinan, ketika tidak adanya pembatasan penduduk maka akan terjadi kelangkaan makanan, hal ini akan menjadi sumber dari kesengsaraan dan kemiskinan manusia. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan masalah keamanan karena terbukanya potensi pengambilan benda milik orang lain. Berdasarkan kajian penduduk salah satu pengukuran kepadatan penduduk antara lain :

1. Kepadatan penduduk kasar atau Kepadatan penduduk aritmatika

Kepadatan penduduk kasar memberikan gambaran banyaknya penduduk pada suatu wilayah setiap kilometer persegi (km²) luas wilayah di daerah tersebut. Angka kepadatan penduduk kasar dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Kepadatan Penduduk (KP)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia (IPM) dihitung dari tiga dimensi sebagai dasar pengukurannya, ke tiga dimensi tersebut yaitu :

1. Kesehatan

Dalam mencerminkan dimensi kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) atau Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH).

2. Pendidikan

Dalam mencerminkan dimensi pengetahuan digunakan dua indikator gabungan yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk. UNDP menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak.

Indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

IPM memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di negara maju maupun berkembang. Nilai IPM yang tinggi memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas penduduk. Penduduk yang berkualitas akan mendorong produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik sehingga akhirnya akan terhindar dari kemiskinan. Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang melihat tidak hanya pada tingkat kesejahteraan penduduk secara ekonomi, tetapi juga secara sosial berdasarkan usia panjang, taraf kehidupan, dan pendidikan. Salah satu cara untuk menyediakan layanan pendidikan yang dapat dirasakan oleh golongan rendah dengan cara

membuat kebijakan publik yang mendukung masyarakat bawah seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Program PIP dibuat dengan harapan mampu memperbaiki sektor pendidikan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia (Dj Julius, Lixian, Lestari, & Eryanto, 2022). Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya suatu ilmu yang nantinya dapat menjamin suatu kehidupan yang lebih baik. Menurut Lochner (2007) meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam bersekolah akan mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminalitas karena waktu yang ada dihabiskan oleh kegiatan produktif.

2.1.7 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran didefinisikan sebagai masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang dalam proses mencari suatu pekerjaan atau sedang dalam proses mempersiapkan membuka usaha baru atau masyarakat yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah yang penting dan besar karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Hal menjadikan pengangguran menjadi topik yang banyak dibahas dalam perumusan kebijakan. Menurut Ismah (2015) menjelaskan kondisi individu yang sedang menganggur ataupun iklim pekerjaan yang tidak kondusif dan pendapatan yang tidak sesuai akan memicu seseorang melakukan tindakan ilegal. Sedangkan menurut Arsyad (2016) berpendapat bahwa terdapat hubungan erat antara pengangguran dengan kemiskinan.

2.1.7.1 Macam-macam Pengangguran dan Sumber Terjadinya

Pengangguran dapat dikelompokkan menjadi pengangguran berdasarkan macam-macamnya yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta karena penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah tetapi penambahan tenaga kerjanya lebih tinggi, akibatnya dalam perekonomian sebagian besar tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$$

2. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman memperlihatkan suatu individu atau kelompok yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, ketika suatu individu atau kelompok tidak dalam masa kerja, individu atau kelompok tersebut menjadi pengangguran.

3. Pengangguran Teknologi

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan beberapa pekerjaan bisa menggunakan robot atau alat sehingga akan ada beberapa tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh teknologi.

2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

PDRB per kapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang.

Perhitungan pendapatan per kapita suatu wilayah dapat dilihat dari dua cara yaitu dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Jika menghitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku maka yang didapatkan adalah pendapatan per kapita nominal. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Jika menghitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan maka yang didapatkan adalah pendapatan per kapita riil.

2.1.9 Perkotaan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 menyatakan bahwa kota merupakan induk aktivitas penduduk dan sentral pemukiman dengan batasan administrasi tertentu berdasarkan pada perundangan. Pada daerah perkotaan biasanya terdapat beberapa masalah : 1) Masalah Sosial dan Kependudukan seperti arus urbanisasi yang tinggi, kepadatan penduduk yang

tinggi, pengangguran dan kriminalitas; 2) Masalah Lingkungan seperti penumpukan sampah dan polusi udara.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pada pasal 12 dan pasal 16 menjelaskan bahwa pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) dapat berupa :

1. Kawasan Megapolitan

Kawasan Megapolitan mempunyai kriteri sebagai berikut :

- a) Memiliki dua atau lebih kawasan metropolitan yang saling berkaitan membentuk sebuah sistem.

2. Kawasan Metropolitan.

Kawasan Metropolitan mempunyai kriteri sebagai berikut :

- a) Memiliki jumlah penduduk minimal 1.000.000 jiwa.
- b) Mempunyai satu kota inti dan beberapa kota di sekelilingnya sebagai pendukung yang memiliki keterkaitan.

3. Kawasan Perkotaan Besar.

Kawasan perkotaan besar memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa.

Tabel 2.2 Beberapa Kota-kota Besar di Indonesia

Pulau	Nama Kota	Jumlah Penduduk (Sensus BPS 2020)
Jawa	Kota Surabaya	2.874.314
Jawa	Kota Bandung	2.444.160
Sumatera	Kota Medan	2.435.252
Sumatera	Kota Palembang	1.668.848

Pulau	Nama Kota	Jumlah Penduduk (Sensus BPS 2020)
Sulawesi	Kota Makassar	1.423.877
Sumatera	Kota Batam	1.196.396
Sumatera	Kota Bandar Lampung	1.166.066
Sumatera	Kota Padang	909.040
Kalimantan	Kota Samarinda	827.994
Bali	Kota Denpasar	725.314
Kalimantan	Kota Banjarmasin	657.663

Sumber : BPS.

4. Kawasan Perkotaan Sedang.

Kawasan perkotaan sedang ditentukan dengan kriteria :

- a) Mempunyai jumlah penduduk 100.000 jiwa sampai 500.000 jiwa.

5. Kawasan Perkotaan Kecil.

Kawasan perkotaan kecil memiliki kriteria :

- a) Memiliki jumlah penduduk dibawah 100.000 jiwa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan sebagai referensi, beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penelitian-penelitian terdahulu

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Ayu Susilowati dan Nadya Tatum Tsaniya (2022) : “The Influence of HDI, Per capita GRDP, and the Unemployment Rate on the Percentage of the Poor in North Sulawesi” .
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per kapita terhadap persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara.

No.	Keterangan	Penjelasan
	Hasil Penelitian	IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dan positif terhadap persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara. PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap persentase kemiskinan.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan metode analisis jalur, objek penelitian yaitu kota-kota besar dan variabel dependennya yaitu tingkat kriminalitas.
2.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Syifa Putri Nur Azizah, Liliani Sumarni Pratiwi, Ima Amaliah dan Freska Fitriyana (2022) : “Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat” .
	Tujuan Penelitian	Mengetahui pengaruh kepadatan penduduk dan sanitasi terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Barat.
	Hasil Penelitian	Kepadatan penduduk dan sanitasi secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Barat.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia.
3.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Salva Aulia Abda dan Hendry Cahyono (2022) : “Apakah IPM, Pengangguran, Dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Surabaya?” .
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran, dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap kemiskinan di kota Surabaya.
	Hasil Penelitian	Ditemukan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan kontribusi pendapatan perempuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia.
4.	Nama, Tahun dan Judul	Indah Purboningtyas dkk (2020): “ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN

No.	Keterangan	Penjelasan
	Penelitian	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH ".
	Tujuan Penelitian	Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
	Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia.
5.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tete Saepudin dan Sestri Nurfala (2022): "Analisis Indikator Ketenagakerjaan dan Demografi terhadap Kemiskinan di Jawa Barat" .
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setengah pengangguran, pekerja sektor pertanian dan non pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa barat selama periode 2011-2019.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Setengah pengangguran berpengaruh tidak signifikan, serta pekerja sektor pertanian dan non pertanian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia.
6.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Ulfa Nadilla dan Talbani Farlian (2018) : "PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN JUMLAH POLISI TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS DI PROVINSI ACEH" .
	Tujuan Penelitian	Untuk melihat pengaruh PDRB perkapita, pendidikan, pengangguran dan jumlah polisi terhadap angka kriminalitas di Provinsi Aceh.

No.	Keterangan	Penjelasan
	Hasil Penelitian	PDRB perkapita terhadap kriminalitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel pendidikan dan pengangguran memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia. Rentang waktu penelitian ini selama 8 tahun (2014-2021).
7.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Shinta Wulandari dan Asnidar (2022): “PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KRIMINALITAS” .
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kota Langsa.
	Hasil Penelitian	Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Kota Langsa, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Kota Langsa, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Kota Langsa.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia. Rentang waktu penelitian ini selama 8 tahun (2014-2021).
8.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Jamaliah dan Elyta (2022) : “The Effect of Human Development Index (HDI) on Poverty and Crime in West Kalimantan, Indonesia” .
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan dan kriminalitas di Kalimantan Barat.
	Hasil Penelitian	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan. Sedangkan, kemiskinan memiliki hubungan yang negatif terhadap kriminalitas.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia. Rentang waktu penelitian ini selama 8 tahun (2014-2021).
9.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Eveline Hachica & Mike Triani (2022) : “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas di Indonesia” .
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap

No.	Keterangan	Penjelasan
		Kriminalitas di Indonesia.
	Hasil Penelitian	Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas. Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas. Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Menambah variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia. Rentang waktu penelitian ini selama 8 tahun (2014-2021).
10.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Fithriati Armin dan Idris (2020) : “Analysis of the Effects of Education, Unemployment, Poverty, and Income Inequality on Crime in Indonesia” .
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia baik secara parsial maupun simultan.
	Hasil Penelitian	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Kemiskinan dan Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas.
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Menambah variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini yaitu kota-kota besar di Indonesia. Rentang waktu penelitian ini selama 8 tahun (2014-2021).

2.3 Kerangka Pemikiran

PDRB perkapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. Ketika terjadi kenaikan nilai PDRB perkapita menandakan terjadi kenaikan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, hal tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu ketika terjadi kenaikan PDRB perkapita akan menyebabkan penurunan

kemiskinan hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Rusta Meitinora (2022) yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sementara itu hasil penelitian berbeda didapat oleh Ayu Susilowati dan Nadya Tatum Tsaniya (2022) yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu PDRB perkapita dapat mempengaruhi kriminalitas, hal itu dikarenakan ketika terjadi kenaikan PDRB perkapita akan membuat penduduk menjadi serba berkecukupan dan makmur sehingga akan mencegah seseorang untuk ikut pada aksi kriminalitas seperti mencuri. Oleh karena itu ketika terjadi kenaikan PDRB perkapita akan menurunkan tingkat kriminalitas hal tersebut sesuai dengan penelitian Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih (2019) yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas sementara itu hasil lain didapat oleh Dinda Desinta (2022) yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas.

Berdasarkan teori kependudukan malthus, pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada pertumbuhan sumber daya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kepadatan penduduk sehingga nantinya sumber daya yang tersedia akan mengalami kekurangan atau kelangkaan sumber daya, hal tersebut akan mengakibatkan kemiskinan alamiah. Ketika tidak adanya pembatasan penduduk maka akan terjadi kelangkaan makanan, hal ini akan menjadi sumber dari kesengsaraan dan kemiskinan manusia. Oleh karena itu peningkatan kepadatan penduduk akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan,

hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yoga I Made Sedana dan dkk (2019) yang menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan sementara itu hasil penelitian yang berbeda didapatkan oleh Syifa Putri Nur Azizah dkk (2022) yang mendapatkan hasil penelitian berupa kepadatan penduduk pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu kepadatan penduduk dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas pada suatu wilayah, kepadatan penduduk akan mengakibatkan penurunan kualitas penduduk sehingga rentan terjadinya persaingan dan konflik sosial yang berujung pada tindakan kriminalitas. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan masalah keamanan karena terbukanya potensi pengambilan benda milik orang lain. Maka dari itu ketika terjadi peningkatan kepadatan penduduk akan meningkatkan tingkat kriminalitas, hal itu sesuai dengan hasil penelitian Todotua (2016) yang menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas pada daerah perkotaan sedangkan hasil berbeda didapatkan oleh Adek Oktaviani Edwart dan Zul Azhar (2019) yang menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas.

Indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di negara maju maupun berkembang. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator pengukuran yang melihat tidak hanya pada tingkat kesejahteraan penduduk secara ekonomi, tetapi juga secara sosial berdasarkan usia panjang, taraf kehidupan, dan pendidikan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya suatu ilmu yang nantinya dapat

menjamin suatu kehidupan yang lebih baik, pendidikan juga akan mendorong peningkatan kualitas penduduk. Nilai IPM yang tinggi memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas penduduk. Penduduk yang berkualitas akan mendorong produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik sehingga akhirnya akan terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduknya sehingga tingkat pendapatan yang diterima lebih baik dan sebaliknya jika nilai IPM rendah maka produktivitas penduduknya akan rendah. Sehingga ketika terjadi kenaikan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan, hal tersebut sesuai dengan penelitian Salva Aulia Abda dan Hendry Cahyono (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sementara itu hasil lain didapat oleh Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari (2016) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu indeks pembangunan manusia (IPM) dapat menghambat tingkat kriminalitas karena IPM dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk. IPM terbentuk dari dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat memberikan gambaran bahwa ketiga dimensi tersebut sangat baik, dengan kesehatan yang baik seseorang akan mampu mengontrol stress dan masalah yang dihadapi, lalu dengan pendidikan yang baik akan membuka kesadaran masyarakat terhadap perbuatan yang tidak benar seperti mencuri sehingga hal itu akan mencegah perbuatan kriminal. Kemudian dengan standar

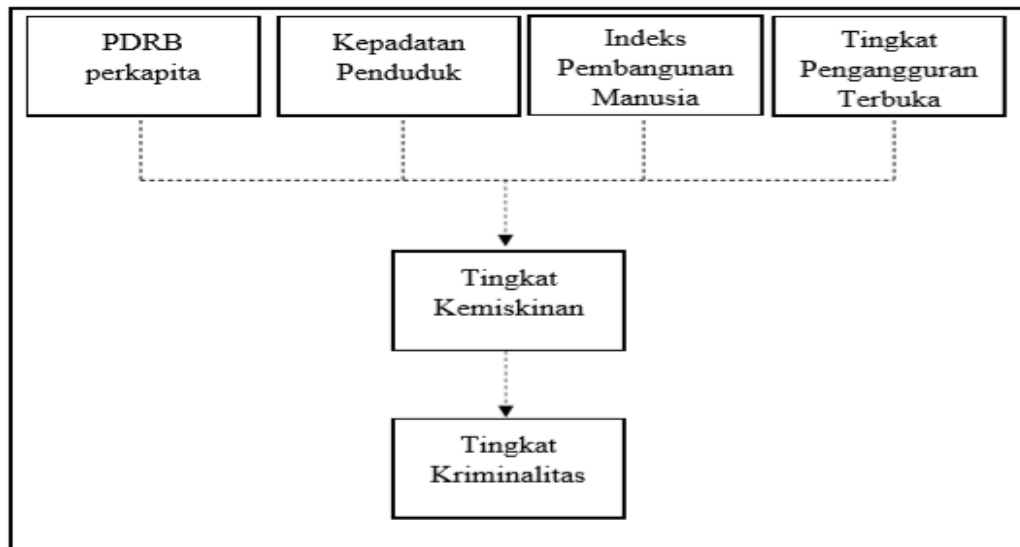
hidup yang layak akan menurunkan hasrat seseorang untuk melakukan aksi kriminal seperti mencuri dikarenakan kehidupan mereka sudah sejahtera dan berkecukupan. Oleh karena itu ketika terjadi kenaikan IPM akan menurunkan tingkat kriminalitas, hal tersebut sesuai dengan penelitian Dinda Desinta (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejadian kejahatan, namun hasil lain didapat oleh Jamaliah dan Elyta (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan.

Pengangguran merupakan kondisi suatu individu yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Arsyad (2016) berpendapat bahwa terdapat hubungan erat antara pengangguran dengan kemiskinan. Ketika seseorang tidak memiliki pendapatan hal tersebut akan menurunkan tingkat konsumsi atau tingkat pengeluaran sehingga pada akhirnya akan terjebak pada kondisi kemiskinan. Oleh karena itu peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, hal itu didukung oleh hasil penelitian Indah Purboningtyas dkk (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Yarlina Yacoub (2012) menyatakan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Suatu individu yang sedang menganggur memiliki waktu produktif yang sedikit dan individu tersebut tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika suatu individu terus menerus berada dalam kondisi pengangguran, untuk memenuhi kebutuhannya individu tersebut akan terdorong untuk melakukan pencurian. Menurut Ismah (2015) menjelaskan kondisi individu

yang sedang menganggur ataupun iklim pekerjaan yang tidak kondusif dan pendapatan yang tidak sesuai akan memicu seseorang melakukan tindakan illegal. Sehingga ketika pengangguran meningkat akan meningkatkan tingkat kriminalitas, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Eveline Hachica dan Mike Triani (2022) yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Fithriati Armin dan Idris (2020) yang menyatakan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Kemiskinan identik dengan kondisi ketidakmampuan suatu individu dilihat dari aspek ekonomi. Individu yang termasuk golongan miskin memiliki pendapatan yang rendah dan memiliki taraf hidup dibawah rata-rata. Kondisi serba kekurangan tersebut menjadikan suatu individu yang tergolong miskin rentan melakukan tindakan kriminal dengan didasarkan adanya motif ekonomi seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menaikkan taraf hidup. Menurut Pare dan Felson (2014) berpendapat bahwa individu yang berada dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko untuk melakukan tindak kriminalitas. Berdasarkan hal itu ketika terjadi kenaikan tingkat kemiskinan akan meningkatkan tingkat kriminalitas, argumen tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fithriati Armin dan Idris (2020) yang menjelaskan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas tetapi hasil berbeda ditemukan oleh Nurhaz Winda dan Sri Ulfa Sentosa (2021) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tindakan kriminalitas.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Diduga PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
2. Diduga kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
3. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
4. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
5. Diduga tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.